

PROJECT BASED GROUP

**Analisis Posisi Indonesia Sebagai Middle Power dalam Sistem Internasional
Melalui Peran di PBB**

Mata Kuliah: Organisasi Internasional dan Globalisasi



Disusun Oleh:

Afifah Nur Khoirunnisa	2316041036
M. Bima Kaifa	2316041065
Amelda Shalsabila Putri	2316041080
Christian Abimanyu Panjaitan	2316041092

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

Analisis Posisi Indonesia Sebagai Middle Power dalam Sistem Internasional Melalui Peran di PBB

PENDAHULUAN

Dinamika hubungan internasional kontemporer, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempati posisi utama sebagai arena utama diplomasi global yang mempertemukan berbagai kepentingan negara dalam satu forum multilateral. PBB tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyelesaian konflik internasional. Dalam konteks ini, sistem internasional menunjukkan adanya hierarki kekuasaan yang membedakan negara ke dalam kategori *great power*, *middle power*, dan *small states*, di mana masing-masing memiliki kapasitas dan pengaruh yang berbeda dalam menentukan arah kebijakan global (Heywood, 2019). Negara-negara dengan kekuatan besar cenderung mendominasi proses pengambilan keputusan, sementara negara menengah berupaya mencari ruang pengaruh melalui strategi diplomasi multilateral dan pembentukan norma internasional (Cooper, 2020).

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara berkembang yang mengadopsi prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menekankan pada kemandirian dalam menentukan sikap sekaligus keterlibatan aktif. Implementasi prinsip ini tercermin dalam keaktifan Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk keterlibatannya sebagai anggota tidak tetap United Nations Security Council serta kontribusinya dalam misi perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai agenda global ini seringkali dijadikan indikator bahwa Indonesia memiliki karakteristik sebagai *middle power* yang mengandalkan diplomasi, kerja sama multilateral, dan legitimasi normatif dalam memperluas pengaruhnya (Laksmana, 2017; Sukma, 2018).

Tingginya tingkat partisipasi Indonesia dalam forum PBB tidak serta-merta mencerminkan besarnya pengaruh yang dimiliki dalam menentukan kebijakan global. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai apakah Indonesia benar-

benar memiliki pengaruh substantif dalam perancangan internasional atau justru hanya menunjukkan keaktifan yang bersifat simbolik. Dalam banyak kasus, posisi Indonesia seringkali lebih terlihat sebagai pendukung konsensus dibandingkan sebagai aktor utama yang mampu menginisiasi atau mengarahkan keputusan strategis di tingkat global (Fitriani, 2020). Kondisi ini menimbulkan dilema antara citra sebagai negara yang aktif secara diplomatik dengan realitas keterbatasan kekuatan dalam struktur kekuasaan internasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menitikberatkan pada tingkat keaktifan Indonesia dalam forum internasional sebagai indikator keberhasilan politik luar negeri, namun masih terbatas kajian yang secara kritis mengevaluasi efektivitas dan dampak nyata dari peran tersebut. Padahal, analisis terhadap efektivitas ini menjadi penting untuk memahami posisi riil Indonesia dalam struktur kekuasaan global, khususnya dalam konteks PBB yang masih didominasi oleh negara-negara besar. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah lebih jauh apakah status Indonesia sebagai *middle power* benar-benar diikuti oleh pengaruh yang signifikan atau hanya bersifat normatif dan simbolik.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana posisi Indonesia sebagai *middle power* dalam PBB, sejauh mana pengaruh yang dimiliki Indonesia dalam forum tersebut, serta apakah peran yang dijalankan bersifat substantif atau sekadar simbolik. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Indonesia sebagai *middle power* dalam PBB, mengukur tingkat pengaruhnya dalam dinamika diplomasi global, serta mengevaluasi efektivitas diplomasi Indonesia dalam menciptakan dampak nyata di tingkat internasional.

TINJAUAN LITERATUR

Middle Power Diplomacy

Konsep *middle power diplomacy* merujuk pada strategi negara-negara yang tidak tergolong sebagai kekuatan besar (*great power*), namun memiliki kapasitas dan kemauan untuk berperan aktif dalam sistem internasional melalui pendekatan multilateral. Negara *middle power* umumnya tidak mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi secara dominan, melainkan negara tersebut menekankan pada peran sebagai mediator atau fasilitator dalam berbagai isu internasional (Sudjatmiko et al., 2022).

Dalam praktiknya, diplomasi *middle power* sering tercermin dalam upaya mendorong kerja sama internasional, resolusi konflik secara damai, serta partisipasi aktif dalam organisasi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia, dalam hal ini, kerap diposisikan sebagai aktor *middle power* yang mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, dengan fokus pada stabilitas kawasan, perdamaian dunia, serta penguatan multilateralisme (Putri et al., 2023). Selain itu, karakteristik *middle power diplomacy* juga terlihat dari kecenderungan negara untuk memainkan peran normatif, seperti memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kedaulatan, dan perdamaian, meskipun tidak memiliki kekuatan struktural yang dominan dalam sistem internasional (Purba & Anugerah, 2020).

Indikator dan Karakteristik Negara *Middle Power*

Mengidentifikasi suatu negara sebagai *middle power*, terdapat beberapa indikator utama yang dapat digunakan, yaitu tingkat keaktifan dalam organisasi internasional, keterlibatan dalam isu-isu global, serta keberadaan legitimasi moral dan diplomatik di mata komunitas internasional. Keaktifan dalam organisasi internasional, seperti keterlibatan Indonesia dalam *United Nations Security Council* sebagai anggota tidak tetap, menunjukkan adanya upaya untuk terlibat dalam proses

pengambilan keputusan global meskipun tanpa kekuatan veto (Purba & Anugerah, 2020).

Selain itu, partisipasi dalam isu-isu global seperti perdamaian dunia, perubahan iklim, dan keamanan internasional menjadi indikator penting lainnya, di mana Indonesia secara konsisten terlibat melalui kontribusi dalam misi penjaga perdamaian dan diplomasi multilateral (Arhanudya et al., 2023). Di sisi lain, legitimasi moral dan diplomatik juga menjadi ciri khas middle power, yang ditunjukkan melalui citra sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai memiliki posisi yang cukup kuat sebagai aktor normatif, meskipun pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan global masih terbatas oleh struktur kekuasaan internasional yang didominasi oleh negara-negara besar (Sudjatmiko et al., 2022).

PEMBAHASAN

Posisi Indonesia sebagai Middle Power dalam Struktur Global

Dalam konfigurasi kekuasaan global, posisi Indonesia tidak berada dalam kategori great power seperti Amerika Serikat maupun Tiongkok yang memiliki dominasi signifikan dalam aspek ekonomi, militer, dan politik internasional. Namun demikian, Indonesia menunjukkan karakteristik kuat sebagai middle power yang ditopang oleh kombinasi kapasitas domestik dan perilaku eksternal yang aktif dalam sistem internasional. Secara demografis, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, yang memberikan potensi pasar dan sumber daya manusia yang signifikan.

Dari sisi politik, Indonesia juga diakui sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, yang meningkatkan legitimasi normatifnya dalam forum internasional (Rosyidin & Kusumawardhana, 2023). Selain itu, konsistensi

Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan strategis dalam memperluas perannya di tingkat global melalui pendekatan diplomasi multilateral (Alvian et al., 2017).

Lebih lanjut, status middle power Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas material, tetapi juga oleh strategi diplomasi yang menekankan pada kerja sama, mediasi, dan pembentukan norma internasional. Indonesia kerap memposisikan diri sebagai bridge-builder yang menjembatani kepentingan antara negara maju dan berkembang, khususnya dalam forum multilateral. Namun demikian, posisi ini juga bersifat ambivalen, karena di satu sisi memberikan ruang bagi Indonesia untuk tampil sebagai aktor yang inklusif, tetapi di sisi lain membatasi kemampuannya untuk bersikap tegas dalam konflik kepentingan global (Sudjatmiko et al., 2022). Dengan demikian, posisi Indonesia sebagai middle power dapat dipahami sebagai kombinasi antara potensi strategis dan keterbatasan struktural dalam sistem internasional.

Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa: Antara Partisipasi dan Pengaruh

Keterlibatan Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan manifestasi konkret dari strategi diplomasi multilateral yang dijalankan sebagai negara middle power. Salah satu bentuk peran paling signifikan adalah keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap United Nations Security Council dalam beberapa periode, yang memberikan akses langsung terhadap isu-isu strategis terkait perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kapasitas ini, Indonesia terlibat dalam pembahasan resolusi konflik, isu terorisme, serta stabilitas kawasan, yang menunjukkan adanya peran aktif dalam proses deliberatif global (Purba & Anugerah, 2020). Namun demikian, keterlibatan ini tetap berada dalam batasan struktural, mengingat tidak adanya hak veto yang menjadi instrumen utama dalam menentukan arah keputusan di Dewan Keamanan.

Selain itu, kontribusi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan Garuda menjadi indikator penting dari komitmennya terhadap stabilitas global. Indonesia secara konsisten menempatkan diri sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian dari negara berkembang, yang tidak hanya mencerminkan kapasitas operasional, tetapi juga komitmen normatif terhadap perdamaian dunia (Hutabarat, 2015). Meskipun demikian, kontribusi ini lebih banyak beroperasi pada level implementatif dibandingkan dengan level pengambilan keputusan strategis, sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan antara partisipasi aktif dan pengaruh substantif dalam struktur PBB.

Bentuk dan Karakter Pengaruh Indonesia: Dominasi Normatif vs Keterbatasan Struktural

Pengaruh Indonesia dalam forum global, khususnya di PBB, cenderung bersifat normatif dan berbasis pada diplomasi nilai (*value-based diplomacy*), dibandingkan dengan kekuatan koersif atau material. Indonesia secara aktif mendorong penyelesaian konflik melalui dialog damai, menolak penggunaan kekerasan, serta mengadvokasi prinsip keadilan internasional, termasuk dalam isu kemerdekaan Palestina yang secara konsisten menjadi prioritas diplomasi Indonesia (Putri et al., 2023). Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam mempromosikan multilateralisme sebagai mekanisme utama dalam mengatasi tantangan global, yang sekaligus menjadi strategi untuk mengimbangi dominasi negara besar dalam sistem internasional (Sudjatmiko et al., 2022).

Pengaruh normatif ini memiliki keterbatasan dalam konteks pengambilan keputusan strategis. Indonesia jarang berada dalam posisi sebagai agenda-setter atau aktor utama yang menentukan arah kebijakan global, melainkan lebih sering berperan sebagai consensus builder atau pendukung keputusan kolektif (Fitriani, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat, kemampuan untuk mengkonversi legitimasi tersebut menjadi kekuatan politik yang konkret masih terbatas. Dengan kata lain, pengaruh Indonesia lebih

terlihat dalam proses daripada hasil akhir, yang memperkuat argumen bahwa perannya cenderung bersifat fasilitatif daripada determinatif.

Analisis Kritis: Antara Pengaruh Nyata dan Ilusi Kekuasaan

Analisis terhadap posisi Indonesia dalam PBB menunjukkan adanya dualitas antara pengaruh nyata dan ilusi kekuasaan dalam sistem internasional. Di satu sisi, Indonesia berhasil membangun citra sebagai negara yang aktif, demokratis, dan berkomitmen terhadap perdamaian dunia, yang memberikan legitimasi normatif dalam forum global (Rosyidin & Kusumawardhana, 2023). Keaktifan ini tercermin dalam partisipasi di berbagai forum internasional, kontribusi dalam misi perdamaian, serta konsistensi dalam memperjuangkan isu-isu global yang bersifat universal.

Namun di sisi lain, struktur kekuasaan internasional yang hierarkis menjadi hambatan utama dalam memperluas pengaruh Indonesia secara substantif. Dominasi negara-negara besar dalam United Nations Security Council, terutama melalui hak veto, menciptakan ketimpangan kekuasaan yang membatasi ruang gerak negara middle power seperti Indonesia (Purba & Anugerah, 2020). Selain itu, keterbatasan kapabilitas ekonomi dan militer juga menjadi faktor yang menghambat kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya tawarnya di tingkat global (Sudjatmiko et al., 2022). Dalam praktiknya, Indonesia seringkali berada dalam posisi mengikuti arus konsensus yang telah dibentuk oleh kekuatan besar, sehingga memperkuat persepsi bahwa pengaruhnya lebih bersifat simbolik daripada substantif (Alvian et al., 2017).

Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki tingkat visibilitas yang tinggi sebagai middle power dalam sistem internasional, namun pengaruhnya masih terbatas dalam menentukan arah kebijakan global. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi ambivalen, di mana keaktifan diplomatik tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan pengaruh, sehingga menciptakan batas tipis antara realitas pengaruh dan ilusi kekuasaan dalam politik global.

PENUTUP

Indonesia dapat dikategorikan sebagai middle power yang aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui diplomasi multilateral, keterlibatan di United Nations Security Council, serta kontribusi dalam misi perdamaian dunia. Keaktifan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam isu global, namun belum sepenuhnya diikuti oleh pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan internasional. Indonesia lebih berperan sebagai pendukung dan fasilitator dibandingkan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh struktur kekuasaan global yang masih didominasi negara besar, serta kapasitas nasional yang belum cukup kuat untuk meningkatkan daya tawar. Dengan demikian, posisi Indonesia mencerminkan karakter khas middle power: aktif dan terlihat di tingkat global, tetapi pengaruhnya masih terbatas dan belum bersifat determinatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, R. A., Putri, G. C., & Ardhani, I. (2017). Haluan baru politik luar negeri Indonesia: Perbandingan diplomasi middle power Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2).
- Arhanudya, R. C., Anwar, S., & Hadisancoko, R. E. (2023). Kontribusi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Community Development Journal*, 4(4).
- Fitriani, E. (2020). Indonesia's foreign policy and its role in global governance. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 123–135.
- Hutabarat, L. F. (2015). Kerangka konseptual kontribusi pada pasukan penjaga perdamaian PBB: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1).
- Purba, J., & Anugerah, B. (2020). Mendefinisikan (kembali) peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan teoretikal dan praktikal dalam mewujudkan perdamaian. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 25–48.
- Putri, L. D. M., Hakiem, H. A., & Hakiem, F. N. (2023). Analysis of Indonesian policy as middle power towards North Korea. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1).
- Rosyidin, M., & Kusumawardhana, I. (2023). Major power in the making: Analisis komprehensif status Indonesia dalam hirarki politik internasional, 2014–2024. *Andalas Journal of International Studies*, 12(2), 163–182.
- Sudjatmiko, T., Yayusman, M. S., Budianto, F., & Syafarani, T. R. (2022). Peran Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam G20 di tengah disrupti geopolitik konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2).